

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim
- Visi Gubernur Jawa Timur : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
- Misi Gubernur Jawa Timur : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
- Tujuan : 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

<b>KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{linc-dist})$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen  IDM = Indeks pengambilan keputusan  linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender</li> <li>- BPS Prov. Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak</li> <li>- Bidang Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	<p>Jumlah anggaran Provinsi Jawa Timur yang sudah responsif gender <math>\times 100\%</math></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>Jumlah Belanja Langsung anggaran Provinsi Jawa Timur</p> <p>ARG adalah anggaran yang tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Data ARG</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak</li> </ul>
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur	<p>Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim Tahun (n-1) – Tahun (n) <math>\times 100\%</math></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim Tahun (n-1)</p> <p>Keterangan :  Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim tahun (n-1) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov. Jatim pada tahun sebelumnya  Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim tahun (n) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT, Non KDRT, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Bulanan PPT Prov. Jatim</li> <li>- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>

		Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov. Jatim pada tahun berjalan		
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	4. Cakupan KB Aktif (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur (PUS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Triwulan Data Pelaksanaan Pembangunan</li> <li>- BKKBN Perwakilan Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengendalian Penduduk &amp; Keluarga Berencana</li> </ul>
	5. Persentase Data Penduduk yang Akurat	$\frac{\text{Jumlah penduduk Jatim yang masuk dalam database kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk Jatim hasil registrasi Kab./Kota yang belum dibersihkan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang masuk ke dalam database adalah data yg sudah dibersihkan dan masuk di data center (Kemdagri)</li> <li>- Data yang belum dibersihkan adalah data penduduk yg memiliki dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, dan pindah tidak melapor.</li> </ul> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data penduduk (data lampid) dari Dispendukcapil Kab./Kota, data penduduk yang masuk ke Pusat (Kemdagri) dan telah dibersihkan oleh Pusat (Kemdagri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**


  
**Dra. LIES IDAWATI, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19570808 198503 2 006